

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Benturan kepentingan antar Negara-negara di kawasan manapun berpotensi menyebabkan konflik dan bisa menciptakan instabilitas baik secara global maupun regional. Konflik kepentingan yang bersumber dari kepentingan ekonomi, politik, sosial apabila tidak tidak dimanage dengan baik, bisa berujung terjadinya konflik secara langsung yang melibatkan kekuatan militer antar Negara-negara tertentu yang merasa *national interest* mereka terusik. Demikian halnya dengan perkembangan konflik klaim wilayah teritori di Laut Cina Selatan yang melibatkan 6 (enam) Negara, 4 (empat) negara anggota ASEAN (Malaysia, Philipina, Vietnam, Brunei) dengan Cina dan Taiwan, menurut argumennya masing-masing bahwa sebagian wilayah Laut Cina Selatan adalah wilayah kedaulatannya (Karim Suharna, 2012, hlm.33).

Dalam sengketa atas kepemilikan Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel mempunyai perjalanan sejarah konflik yang panjang. Sejarah menunjukkan bahwa, penguasaan kepulauan ini telah melibatkan Inggris, Perancis, Jepang, RRC, Vietnam, yang kemudian Malaysia, Brunei, Filipina dan Taiwan. Sengketa teritorial di kawasan Laut Cina Selatan bukan hanya terbatas pada masalah kedaulatan atas kepemilikan, tetapi juga bercampur dengan masalah hak berdaulat atas Landas Kontinen dan ZEE serta menyangkut masalah penggunaan teknologi baru penambangan laut dalam (dasar laut) yang menembus kedaulatan Negara.

Sengketa diawali oleh tuntutan China atas seluruh pulau-pulau di kawasan laut China Selatan yang mengacu pada catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta, dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Menurut China, sejak 2000 tahun yang lalu, Laut China Selatan telah menjadi jalur pelayaran bagi mereka. Vietnam menyebutkan Kepulauan Spratly dan Paracel secara efektif didudukinya sejak abad ke 17 ketika kedua kepulauan itu tidak berada dalam penguasaan suatu negara. Selain Vietnam Selatan, Kepulauan

Spratly juga diduduki oleh Taiwan (sejak Perang Dunia II) dan Filipina (tahun 1971). Sedangkan Filipina pada tahun 1978 menduduki kelompok gugus pulau di bagian Timur kepulauan Spratly yang disebut sebagai Kelayaan, pulau Panata dengan alasan tidak sedang dimiliki oleh negara-negara manapun (kosong). Sementara, Brunei Darussalam yang memperoleh kemerdekaan secara penuh dari Inggris 1 Januari 1984 juga ikut mengklaim wilayah perairan Kepulauan Spratly. Dalam masalah klaim multilateral, seringkali masalah klaim RRC, Taiwan dan Vietnam dibahas menjadi satu karena erat kaitannya antara yang satu dengan lainnya, akibat perkembangan sejarah, misalnya antara RRC dan Taiwan, Vietnam Selatan, Vietnam Utara dan Vietnam setelah unifikasi. Situasi politik keamanan di Laut China Selatan dalam setahun terakhir berkembang dengan sangat dinamis. Ketika China yang mengklaim seluruh wilayah perairan Laut China Selatan semakin asertif dalam menegaskan klaimnya, negara-negara lain pun tidak mau kalah dalam menegaskan kepentingannya di wilayah sengketa itu. Baik negara-negara yang berstatus pengklaim maupun negara yang bukan pengklaim.

Yang lebih penting lagi, Laut China Selatan adalah kawasan perairan yang strategis, yang kaya sumber daya alam (SDA). Konflik antar negara yang terlibat saling klaim kepemilikan atas pulau-pulau (kepulauan) di sana (*claimant states*) baru muncul di dasawarsa 1970, dan berulang kembali di dasawarsa 80, 90 hingga 2010. Namun, tidak dapat disangkal di masa lalu, penguasa-penguasa tradisional dari Tiongkok (China) dan Vietnam, dan negara-negara baik yang terlibat saling klaim sekarang maupun tidak itu, pernah terlibat memperebutkan kontrol atas wilayah perairan di sana (Poltak Partogi Nainggolon dkk, *Konflik Laut Cina Selatan dan Implikasinya Terhadap Kawasan*: 2013).

Potensi kekayaan Laut China Selatan yang semakin dapat dieksplorasi belakangan ini mengungkapkan kepada dunia bahwa Paracel dan Spratly kemungkinan memiliki cadangan besar Sumber Daya Alam (SDA), terutama mineral, minyak bumi dan gas alam. Pemerintah RRC sendiri sangat optimistik dengan potensi SDA yang ada di sana melalui riset-riset yang terus dilaksanakannya. Berdasarkan laporan lembaga Informasi Energi Amerika (*Energy Information Administration - EIA*), RRC memperkirakan terdapatnya cadangan minyak di sana sebesar 213 miliar barel, atau sekitar 10 kali lipat

cadangan nasional Amerika Serikat (AS). Sedangkan para ilmuwan AS memperkirakan terdapat sekitar 28 miliar barel minyak di kawasan Laut China Selatan. Adapun EIA menginformasikan, cadangan terbesar SDA disana kemungkinan berasal dari gas alam, yang diperhitungkan sekitar 900 triliun kaki kubik, atau sama dengan cadangan minyak yang dimiliki Qatar. Di samping itu, perairan kawasan Laut China Selatan merupakan rute utamaperkapalan dan sumber pencarian ikan bagi kehidupan banyak orang dari berbagai negeri yang terletak di sekitarnya.

Aksi saling cegah dan usir dari kawasan perairan yang dipersengketakan itu terus meningkat belakangan, dan cenderung mengarah pada terciptanya konflik berskala rendah (*low intensity conflict*). Tetapi, tetap terbuka kemungkinan munculnya konflik bersenjata terbuka secara luas dengan intensitas tinggi (*high intensity conflict*), jika resolusi konflik permanen gagal ditemukan, mengingat besarnya kepentingan baik negara yang mengklaim maupun tidak (*claimant dan non-claimant states*), serta negara luar kawasan.

Adalah wajar jika kemungkinan permasalahan-permasalahan teritorial dan batas maritim diatas juga turut mewarnai hubungan beberapa negara dengan Indonesia ke depan, sehingga menjadi penting juga bagi Indonesia khususnya para pengambil kebijakan di tingkat nasional memperhatikan dan mencermati perkembangan strategis di beberapa negara tersebut, setidaknya negara-negara di kawasan asia pasifik dan asia tenggara yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung dengan Indonesia, karena mereka memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Seperti diketahui bersama, saat ini terjadi persaingan atau rivalry antara Cina dengan Amerika Serikat, kedua negara tentu juga saling memantau kekuatan, kelemahan, kemampuan dan niat masing-masing negara terhadap negara lawannya.

Sengketa konflik di Laut Cina Selatan juga rawan berkembang menjadi konflik bilateral maupun multilateral di kawasan, yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan regional dan global. Selain itu, penempatan 2.500 personel mariner AS di Darwin, Australia, berpotensi menimbulkan kecurigaan dan ketegangan baru oleh negara-negara di kawasan, terutama bagi RRC terkait peran

AS di Philipina dan Taiwan. Sebelumnya, AS juga telah menempatkan pasukan di pangkalan militernya di Pulau Okinawa, Jepang dan di Guam, sekitar 2.000 kilometer sebelah utara Papua Nugini. Diperkirakan, penempatan pasukan marinir AS secara permanen di Australia tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan aliansi AS-Australia dalam menghadapi kebangkitan RRC.

Dalam ASEAN Regional Forum (ARF), di mana RRC menjadi salah satu anggotanya, Indonesia dan ASEAN telah berupaya melibatkan RRC membahas masalah keamanan Asia Pasifik dan Asia Tenggara. ASEAN sendiri belum secara tegas menekankan kembali agenda politik dan keamanan kawasan, dalam posisinya sebagai penggerak ARF. Ke depan, khususnya pada 2015, ASEAN diharapkan dapat mempercepat implementasi pedoman perilaku negara-negara yang terlibat konflik LCS, agar ASEAN sebagai organisasi regional tidak kehilangan relevansinya. Kebijakan ASEAN untuk ARF harus berorientasi pada *Declaration on the Conduct of Parties (DOC)*, sebagai ajang konsolidasi ARF. Namun demikian, yang harus tetap menjadi pedoman utama adalah tetap ditegakkannya *dynamic equilibrium* di Asia Pasifik, artinya tidak ada satu negara pun yang ingin menjadi negara hegemoni dan mendikte serta penyelesaian persengketaan secara damai, termasuk dalam menjaga keamanan maritim regional, sehingga krisis LCS dapat diarahkan ke suasana kondusif.

Dalam upaya untuk berkontribusi dalam memelihara perdamaian dan stabilitas di tingkat kawasan hampir tidak ada satupun masalah di kawasan yang luput dari perhatian Indonesia. Terkait isu Laut China Selatan misalnya, Indonesia secara gigih mengingatkan seluruh pihak bahwa satu-satunya pilihan penyelesaian permasalahan adalah melalui jalan damai. Penggunaan kekerasan ataupun ancaman penggunaan kekerasan bukanlah merupakan sebuah opsi.

Indonesia terus menjalin komunikasi dengan negara-negara terkait untuk memastikan dikedepankannya upaya-upaya damai dalam menyelesaikan permasalahan klaim wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya inisiatif dan prakarsa Indonesia yang menghasilkan *Bali Principles*. Sebuah prinsip yang mengatur norma dasar perilaku dan hubungan antar negara di kawasan Asia dan Pasifik yang senantiasa mengedepankan cara-cara damai dan menghindari penggunaan kekerasan dan ancaman penggunaan kekerasan.

Pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan baru Presiden Jokowi telah mengkampanyekan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Hal ini berarti kebijakan luar negeri Indonesia berorientasi pada maritime, sehingga konflik Laut China Selatan tidak bisa diabaikan oleh Pemerintahan Indonesia. Ke depan Diplomasi Indonesia akan menghadapi tantangan yang kian berat sebagai dampak dari persaingan antara kekuatan lama dan kekuatan baru kawasan dan kuatnya tarikan-tarikan pengelompokan geopolitik terhadap negara-negara yang tidak secara langsung terlibat dalam persaingan antar dua kekuatan tersebut. Kondisi demikian menuntut Indonesia untuk mampu "*navigating in turbulent ocean*" sebagaimana dahulu di era Perang Dingin dituntut mampu "mendayung diantara dua karang". Sungguh bukan suatu hal yang mudah bagi diplomasi Indonesia yang menjadikan ASEAN sebagai lingkaran konsentris pertama dan utama dalam diplomasi untuk menciptakan suatu keseimbangan dinamis di tengah tarikan-tarikan agar ASEAN condong ke salah satu dari dua kekuatan yang tengah berkompetisi itu.

Menurut Christian Le Mière, dalam diplomasi maritime abad 21 dengan tegas mengatakan bahwa pada era ini akan menjadi abad maritim. Mayoritas perdagangan global perjalanan melalui laut, sebagian besar penduduk dunia hidup dalam jarak 200 kilometer dari pantai, dunia terus bergantung pada laut sebagai sumber protein, dan ekosistem laut terletak di jantung perubahan iklim global. Bahkan Internet-konon pengemudi perubahan di masa depan-bergantung pada kabel yang melintasi dasar laut. Akibatnya, kemampuan Negara untuk mengelola sengketa di laut akan menentukan politik internasional di abad ini (Le Miere, Cristian, 2014).

Kondisi saat ini merupakan salah satu kesempatan terbaik dalam sejarah Indonesia sejak 1945 bagi TNI Angkatan Laut untuk mampu dan bisa mengejawantahkan visi Presiden yang menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dalam teori diplomasi Angkatan Laut ke dalam tataran empiris. Sejarah akan mencatat bagaimana pelibatan regional TNI Angkatan Laut akan memberikan warna, bahkan mungkin mempengaruhi arsitektur kerjasama maritim dan kerjasama keamanan maritim kawasan Asia Pasifik pada setidaknya 25 tahun

mendatang. Untuk bisa mendukung diplomasi maritim, TNI Angkatan Laut harus mampu menjadi *sea power* Indonesia dalam arti yang sebenarnya.

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba mengidentifikasi langkah-langkah yang sudah ditempuh serta perkembangan yang diperoleh terutama melalui pendekatan strategi diplomasi maritime dan apa yang bisa dilakukan kedepan agar penyelesaian sengketa atas wilayah Laut China Selatan terutama sengketa atas kepulauan Spratly dan Paracel bisa berjalan efektif. Maka dalam penelitian ini, Penulis mengambil judul: ***"Strategi Menyelesaikan Konflik Perbatasan Teritorial dan Perbatasan Maritim Dengan Damai Di Laut China Selatan"***.

I.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Masih belum ada kesepakatan kepemilikan pulau yang menjadi sengketa atas kepulauan Spratly dan Paracel.
- b. Belum optimalnya peran Negara ASEAN dengan upaya diplomasi preventif dua jalur dalam mengurangi ancaman keamanan akibat ketegangan konflik yang timbul di kawasan
- c. Adanya pihak luar yang berkepentingan dan mempunyai kekuatan besar di kawasan Laut Cina Selatan seperti Amerika Serikat
- d. Munculnya instabilitas kawasan Asia Pasifik sebagai dampak dari persaingan Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan
- e. Kepentingan ASEAN dalam menjaga stabilitas hubungan negara-negara anggotanya, khususnya yang terlibat langsung dalam konflik Laut Cina Selatan (Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darusalam)
- f. Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang strategis dan sangat potensial untuk menjadi pangkalan militer dari negara-negara yang akan meluaskan pengaruhnya di Asia Tenggara. Kemungkinan tersebut merupakan ancaman yang harus diperhatikan Indonesia dan ASEAN dalam mempertahankan keamanan regional.

- g. Masalah ekonomis, Laut Cina Selatan memiliki potensi besar baik dari sumber daya mineral, perikanan bahkan minyak dan gas bumi.

I.3. Perumusan Masalah

Ditelusuri dari akar permasalahannya, konflik sebenarnya adalah mengenai klaim-klaim di wilayah perairan dan kepulauan di kawasan Laut China Selatan. Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel menjadi focus perebutan antar negara- negara pengklaim. Tetapi yang lebih disorot adalah Kepulauan Spratly yang kemudian menjadi isu dominan internasional. Banyaknya Negara yang terlibat dalam konflik ini karena memiliki berbagai kepentingan di dalamnya menyebabkan kawasan kepulauan Spartly tidak lagi kondusif. Ketidakstabilan hubunganpun terjadi dalam bidang politik, ekonomi, keamanan dan diplomatik, jika tidak ditangani dengan baik akan berpotensi menimbulkan ancaman yang serius.

Rumusan masalah:

- a. Faktor-faktor apa saja yang membuat sumber konflik di Laut China Selatan?
- b. Bagaimana pengaruh konflik Laut China Selatan terhadap keamanan Nasional Indonesia?
- c. Bagaimana pengaruh komponen geopolitik terhadap konflik territorial di Laut Cina Selatan
- d. Bagaimana strategi Diplomasi maritim Indonesia dalam penyelesaian Konflik Laut China Selatan?

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

- 1) Untuk mendapatkan informasi lengkap terkait faktor-faktor apa saja yang membuat sumber konflik di Laut Cina Selatan
- 2) Untuk mengetahui mekanisme pendekatan strategi diplomasi maritime dalam upaya penyelesaian konflik sengketa teritorial dan batas maritim di Laut Cina Selatan.
- 3) Untuk mengetahui kepentingan apa yang membuat Indonesia berperan dalam penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan

b. Manfaat penelitian

- 1) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat secara komprehensif akar konflik Laut China Selatan serta dapat dijadikan referensi untuk membuat strategi diplomasi maritim yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
- 2) Secara akademis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk melihat posisi strategis Indonesia, baik di wilayah maritim ataupun diplomasi di tingkat global.

